SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

Kontribusi Mahasiswa Magang MBKM dalam Peningkatan Kinerja BPPD Sidoarjo

Muhammad Hamim Riduwan Ridiansyah[1*], Aufar Fadlul Hady[2]
[1,2]Universitas Trunojoyo Madura

**Korespondensi*
E-mail: hamimr1991@gmail.com

Dikirim: 26 November 2025	Direvisi: 10 Januari 2026	Diterima: 19 Januari 2026

Abstrak

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang industri dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada penumpukan pekerjaan administratif, keterlambatan penyelesaian tugas, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama empat bulan, mulai 10 Februari hingga 6 Juni 2025, melalui penempatan mahasiswa pada bidang keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Metode pelaksanaan meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Mahasiswa berkontribusi dalam pengelolaan data perpajakan, perhitungan target dan realisasi penerimaan pajak, rekapitulasi belanja perjalanan dinas, pelaporan wajib pajak, penyusunan Rencana Kerja (Renja), pembuatan surat tanda bukti penerimaan, serta input data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengelolaan dan akses informasi keuangan melalui digitalisasi arsip, serta mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan publik di BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Magang Industri, Kinerja, BPPD Kabupaten Sidoarjo

Abstract

The Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) industrial internship program was implemented as a community service initiative to support the improvement of public service performance at the Regional Tax Service Agency (BPPD) of Sidoarjo Regency. The main challenges faced by the partner institution included limited human resources, which resulted in the accumulation of administrative workloads, delays in task completion, and increasing public demands for accountability and transparency in local financial management. This community service activity was conducted over a four-month period, from February 10 to June 6, 2025, through the placement of students in the financial division of BPPD Sidoarjo Regency. The implementation method consisted of preparation, activity execution, monitoring and evaluation, and report preparation stages. Students contributed to tax data management, calculation of tax revenue targets and realizations, recapitulation of official travel expenditures, taxpayer reporting, preparation of the Work Plan (Renja), issuance of revenue receipt documents, and data entry into the Regional Government Information System (SIPD). The results indicate that student involvement enhanced operational efficiency, accelerated financial data management and accessibility through archive digitalization, and contributed to improved productivity and public service quality at BPPD Sidoarjo Regency.

Key Words: *Industrial Internship, Performance, Sidoarjo Regency BPPD*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola organisasi dan dunia kerja. Kondisi ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan kerja yang dinamis (Kaswan, 2019). Namun demikian, proses pembelajaran di perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan lulusan yang sepenuhnya siap menghadapi kebutuhan praktis dunia kerja (Panjaitan et al., 2022). Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah menginisiasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan nyata di lapangan melalui pembelajaran berbasis pengalaman, salah satunya melalui kegiatan magang industri.

Pada bidang akuntansi, perkembangan praktik pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, khususnya di sektor publik, menuntut penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat. Teori dan praktik akuntansi berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang andal, terutama melalui sistem pengendalian internal, pengelolaan data keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelaporan (Baridwan, 2000; Romney & Steinbart, 2015; Solechan, 2021). Tuntutan ini semakin relevan pada lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan keuangan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi pengelola perpajakan daerah dihadapkan pada tantangan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Jubaedah, 2011). Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan administratif, keterlambatan penyelesaian tugas, serta kurang optimalnya pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tambahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat efektivitas pengelolaan data dan sistem keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 14 Tahun 2008 dan PP No. 12 Tahun 2019.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, program magang MBKM dilaksanakan di BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang mengintegrasikan peran mahasiswa dalam mendukung kinerja instansi pemerintah daerah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan teori akuntansi dan kebijakan perpajakan daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi mitra melalui dukungan teknis pengelolaan keuangan dan perpajakan. Kolaborasi ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, serta mendukung penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Sitepu, 2022).

Kegiatan magang industri ini dilaksanakan selama empat bulan, mulai 10 Februari hingga 6 Juni 2025, dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta

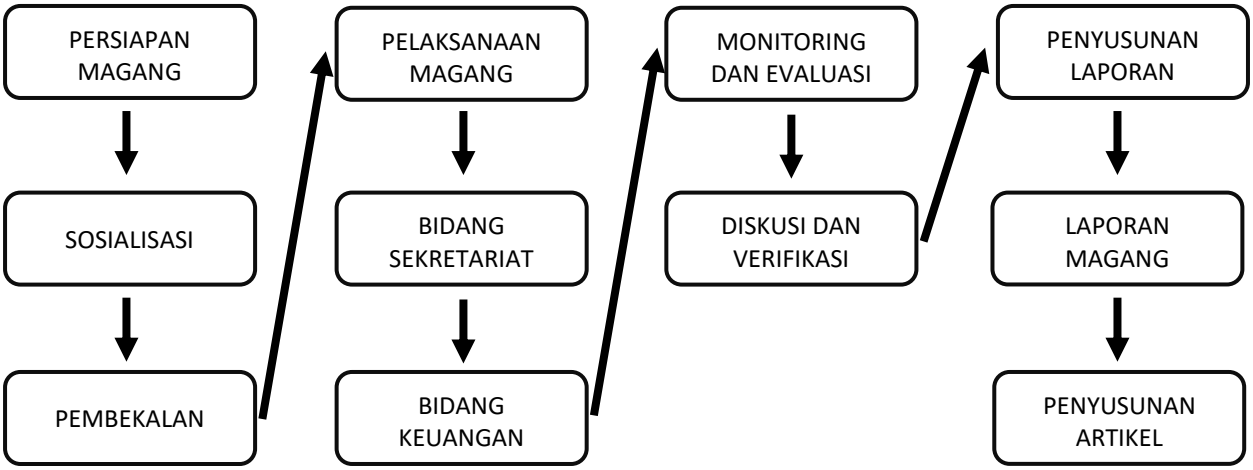
SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

penyusunan laporan. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas pengelolaan keuangan dan perpajakan, program ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional BPPD Kabupaten Sidoarjo, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini mencerminkan konsep keberpihakan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas institusi publik dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan (Amika & Sulistyowati, 2024) .

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat berbasis magang industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang melibatkan mahasiswa sebagai agen pendukung peningkatan kinerja instansi mitra. Lokasi kegiatan bertempat di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dan berlangsung selama empat bulan, yaitu dari 10 Februari hingga 6 Juni 2025. Subjek pengabdian meliputi mahasiswa peserta program MBKM, pegawai bidang keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, serta dosen pembimbing lapangan sebagai pihak pendamping dan pengawas kegiatan.

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, meliputi tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan. Tahapan ini dirancang untuk memastikan keterlaksanaan kegiatan secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian luaran pengabdian. Uraian tiap tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1 Tahapan Kegiatan Magang

Gambar 1 menunjukkan Tahap persiapan mencakup kegiatan sosialisasi dan pembekalan. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa

mengenai tujuan program, ruang lingkup kegiatan, serta peran dan tanggung jawab selama pelaksanaan pengabdian di instansi mitra. Selanjutnya, pembekalan difokuskan pada penguatan kompetensi teknis dan nonteknis yang relevan dengan kebutuhan BPPD Kabupaten Sidoarjo, termasuk pemahaman alur kerja administrasi keuangan dan perpajakan, serta pengembangan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim.

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan pengabdian, di mana mahasiswa ditempatkan pada bidang keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan daerah. Pada tahap ini, mahasiswa terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pengelolaan data keuangan, pencatatan dan verifikasi transaksi, serta penggunaan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku di instansi mitra.

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh dosen pembimbing lapangan bekerja sama dengan pihak instansi mitra. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, menilai capaian luaran pengabdian, serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, diskusi, dan umpan balik dari pegawai pendamping di BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Tahap akhir berupa penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pengabdian. Laporan ini memuat rangkaian aktivitas, hasil yang dicapai, serta evaluasi pelaksanaan program. Selain laporan utama, luaran tambahan berupa artikel pengabdian masyarakat disusun sebagai upaya diseminasi hasil kegiatan dan kontribusi program terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik di BPPD Kabupaten Sidoarjo.

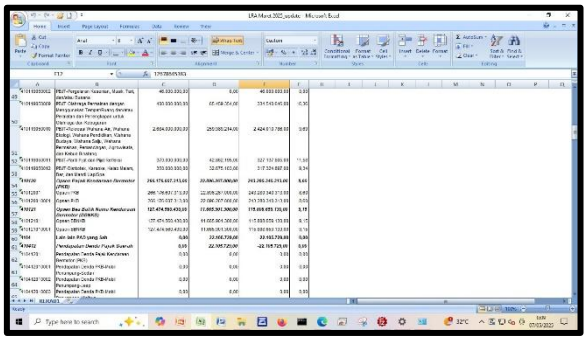
DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan aktivitas magang dan pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan pendampingan langsung dari para pegawai instansi. Pengawasan ini bertujuan memastikan mahasiswa memperoleh bimbingan yang tepat selama melaksanakan tugasnya. Berikut uraian hasil dan pembahasan kegiatan yang telah dilaksanakan:

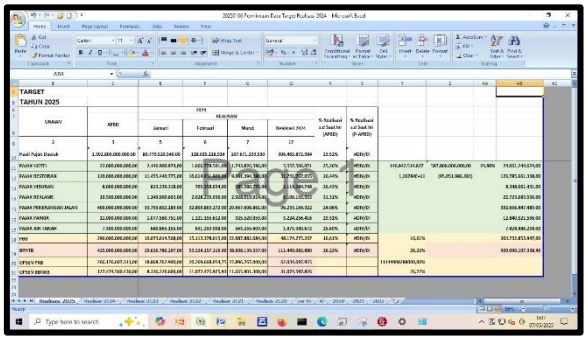
1. Entry Data & Menghitung Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Dalam kegiatan ini, mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pencatatan dan perhitungan penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo. Tugas utamanya mencakup penginputan data ke sistem informasi dan melakukan perhitungan perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi penerimaan pajak dari berbagai sektor seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan pajak daerah lainnya.

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023



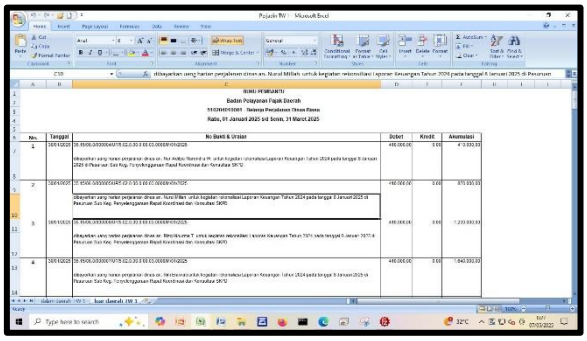
Gambar 2 Entry Data & Menghitung Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (1)



Gambar 3 Entry Data & Menghitung Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (2)

Proses perbandingan ini mencerminkan metode analisis kinerja yang menjadi dasar evaluasi efektivitas pemungutan pajak (Zikriani & Nurabiah, 2025). Penggunaan sistem informasi dalam verifikasi data mendukung prinsip pengendalian dan pemantauan berkelanjutan, memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam penerimaan pajak daerah (Kurniawan, 2024).

2. Rekapitulasi Belanja Biaya Perjalanan Dinas Keluar Kota



Gambar 4 Rekapitulasi Belanja Biaya Perjalanan Dinas Keluar Kota

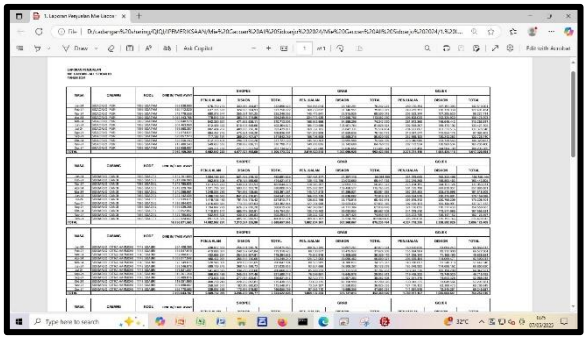
Mahasiswa ditugaskan mengumpulkan dan merangkum data pengeluaran perjalanan dinas luar kota yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Proses rekapitulasi ini meliputi pencatatan rincian biaya transportasi, penginapan, dan uang saku harian, serta pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung.

Verifikasi terhadap dokumen pendukung seperti surat penugasan dan bukti-bukti pengeluaran menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang memastikan integritas

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

penggunaan anggaran dengan bantuan buku pembantu sebagai acuan (Duinkerken et al., 2023). Proses ini juga berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah penyalahgunaan dana melalui klaim tidak wajar, mengurangi risiko penyelewengan dana publik (Sibagariang et al., 2025).

3. Entry Data & Menghitung Pelaporan WP

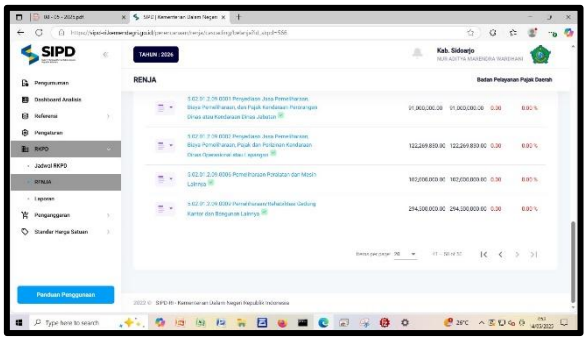


Gambar 5 Entry Data & Menghitung Pelaporan WP

Pada kegiatan ini, mahasiswa membantu proses administratif pelaporan data Wajib Pajak di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Mahasiswa bertugas memasukkan informasi dari data pelaporan pajak yang diserahkan oleh Wajib Pajak ke dalam sistem dan melakukan pengecekan kesesuaian antara nilai yang dilaporkan.

Pemrosesan dan verifikasi data ini mendukung terwujudnya transparansi dalam sistem perpajakan daerah (Palis, 2025). Penggunaan teknologi dalam validasi data memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian secara sistematis, membantu mendeteksi pola pelaporan yang tidak wajar yang dapat mengindikasikan upaya penghindaran kewajiban fiskal (Herawati et al., 2025).

4. Memberikan Bantuan Dalam Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja)



Gambar 6 Memberikan Bantuan Dalam Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja)

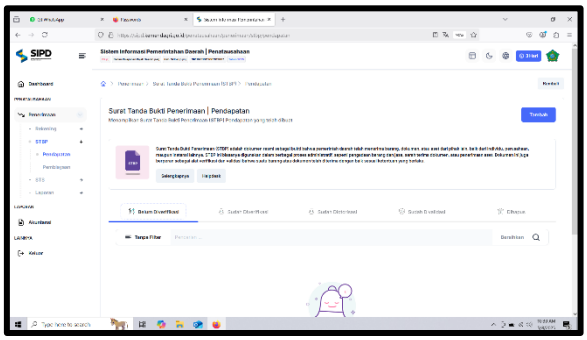
Dalam tugas ini, mahasiswa menganalisis berbagai data di platform SIPD yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan. Dengan mengidentifikasi program atau kegiatan yang anggarannya tidak sesuai ketentuan (baik melebihi atau kurang dari standar),

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

mahasiswa membantu dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Analisis ini memastikan alokasi sumber daya selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebijakan fiskal (Hafizd et al., 2024). Pertimbangan faktor berkelanjutan dalam perencanaan anggaran menunjukkan kesadaran akan dampak jangka panjang dari keputusan keuangan terhadap ekosistem sosial di Kabupaten Sidoarjo (Fitria et al., 2024).

5. Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan Pada Pendapatan

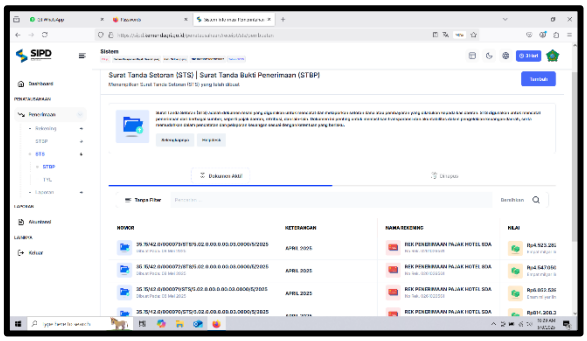


Gambar 7 Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan Pada Pendapatan

Dalam kegiatan ini, mahasiswa bertugas menambah dokumen berupa surat tanda bukti penerimaan untuk setiap transaksi pendapatan pajak daerah. Prosesnya dimulai dengan memeriksa dokumen sumber pendapatan, lalu menginput data tersebut ke sistem SIPD dan memastikan kevalidasiannya.

Pencatatan formal ini menjadi dasar pengakuan pendapatan dalam sistem keuangan daerah (Andea et al., 2020). Penggunaan sistem terintegrasi dalam proses dokumentasi menciptakan jejak transaksi yang jelas, meningkatkan transparansi dan memudahkan penelusuran jika terjadi ketidaksesuaian, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan dalam pengelolaan penerimaan daerah (Kurniawan, 2024).

6. Menginput Surat Tanda Setoran Pada Laman SIPD



Gambar 8 Menginput Surat Tanda Setoran Pada Laman SIPD

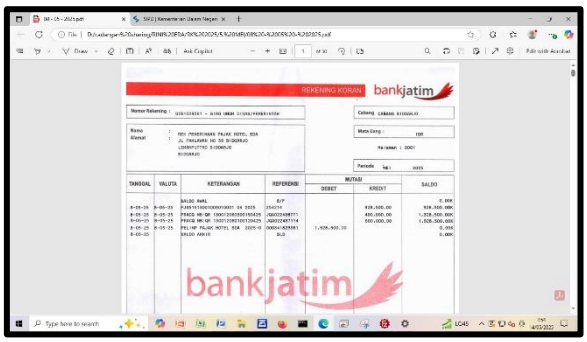
Mahasiswa diberikan tanggung jawab untuk memasukkan informasi dari surat tanda setoran ke dalam sistem SIPD. Data yang diinput mencakup jenis pendapatan, jumlah uang

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

yang disetor, tanggal penyetoran, dan identitas penyetor, lalu dilakukan pengecekan ulang dengan membandingkannya terhadap catatan dalam buku pembantu.

Proses rekonsiliasi ini memastikan konsistensi pencatatan dan mencegah kesalahan dalam pelaporan keuangan (Wijaya et al., 2025). Penggunaan sistem elektronik meningkatkan efisiensi pemantauan transaksi, menciptakan lapisan pengawasan tambahan yang dapat mendeteksi pola-pola tidak wajar dalam penyetoran dana ke kas daerah (Purnamasari et al., 2025).

7. Pemindaian dan Pencetakan Rekening Koran Penerimaan Pajak



Gambar 9 Pemindaian dan Pencetakan Rekening Koran Penerimaan Pajak

Mahasiswa bertanggung jawab melakukan digitalisasi rekening koran penerimaan pajak melalui proses pemindaian. Dokumen digital tersebut kemudian dicetak dan dibagikan kepada bidang-bidang terkait sesuai dengan jenis pajak dan tanggung jawabnya, serta disimpan baik dalam bentuk fisik maupun digital menggunakan sistem pengarsipan yang terorganisir.

Transformasi dokumen ke format digital meningkatkan aksesibilitas informasi sambil mempertahankan nilai pembuktiannya (Erlina et al., 2025). Sementara sistem pengarsipan terstruktur memudahkan penelusuran historis transaksi dan memungkinkan rekonstruksi aliran dana jika diperlukan untuk investigasi transaksi keuangan (Latif & Pratama, 2015).

Sebelum ada program magang MBKM, pekerjaan di kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo cenderung terasa berat karena semua tugas harus dikerjakan sendiri oleh para pegawai. Berdasarkan wawancara pada staf pekerja, beberapa pekerjaan jadi menumpuk dan penyelesaiannya pun jadi lebih lama. Jumlah pegawai yang terbatas membuat mereka harus membagi waktu dan tenaga untuk mengurus banyak hal sekaligus, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum bisa berjalan seefisien yang diharapkan.

Setelah adanya mahasiswa magang dari program MBKM mulai membantu, suasana kerja di kantor pun berubah. Mahasiswa ikut membantu mengerjakan tugas-tugas administratif, seperti mengelola data, membuat laporan, dll, sehingga pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu kini bisa selesai lebih cepat dan produktif. Kehadiran mereka juga membuat pegawai bisa lebih fokus pada tugas-tugas penting lainnya. Dengan adanya bantuan dari mahasiswa magang, kinerja kantor menjadi lebih baik dan pelayanan kepada

SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

masyarakat pun semakin meningkat. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak kehadiran mahasiswa magang terhadap kondisi kerja di kantor, berikut perbandingan dalam bentuk gambar.



Gambar 10 Perbandingan Kondisi Kerja

Berdasarkan Gambar 10 Perbandingan Kondisi Kerja, kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program MBKM menunjukkan bahwa beban kerja pegawai di BPPD Kabupaten Sidoarjo tergolong cukup tinggi. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan penumpukan pekerjaan administratif yang kerap terjadi, sehingga proses penyelesaian tugas sering mengalami keterlambatan. Dalam situasi tersebut, fokus kerja pegawai menjadi terbagi karena harus menangani berbagai tugas secara bersamaan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal.

Sebaliknya, setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, terjadi perubahan positif yang signifikan pada kondisi kerja di BPPD Kabupaten Sidoarjo. Keterlibatan mahasiswa magang MBKM mampu membantu meringankan beban kerja pegawai sehingga pekerjaan administratif menjadi lebih terkendali dan penumpukan tugas dapat diminimalkan. Proses penyelesaian pekerjaan menjadi lebih tepat waktu dan efisien, memungkinkan pegawai untuk bekerja dengan fokus yang lebih baik pada tugas-tugas inti. Dampak lanjutan dari perbaikan tersebut tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun responsivitas layanan perpajakan daerah. Paragraf ini menegaskan bahwa program pengabdian berbasis MBKM memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis magang industri di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan publik. Keterlibatan mahasiswa dalam bidang keuangan mampu mendukung penyelesaian pekerjaan administratif secara lebih cepat dan terstruktur, khususnya dalam pengelolaan data perpajakan, pelaporan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Hal ini berdampak pada berkurangnya penumpukan pekerjaan dan meningkatnya produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi instansi mitra, kegiatan ini juga berkontribusi pada penguatan kompetensi mahasiswa melalui penerapan langsung teori akuntansi dan kebijakan perpajakan daerah dalam konteks kerja nyata. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan BPPD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa program MBKM dapat menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, direkomendasikan pengembangan program pengabdian berkelanjutan melalui perluasan penempatan mahasiswa pada berbagai bidang di BPPD Kabupaten Sidoarjo guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai administrasi perpajakan daerah. Penguatan kemitraan antara Universitas Trunojoyo Madura dan BPPD Kabupaten Sidoarjo juga perlu ditingkatkan melalui program pelatihan bersama, pertukaran pengetahuan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Upaya ini dapat diperkuat melalui pembentukan pusat studi perpajakan daerah dan program sertifikasi kompetensi yang diakui bersama, sehingga tercipta sinergi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan sektor pemerintahan daerah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo dan pegawai bidang keuangan yang memberikan bimbingan selama pelaksanaan program MBKM. Apresiasi disampaikan kepada Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, serta dosen pembimbing lapangan atas dukungan dan monitoring kegiatan. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menginisiasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Keberhasilan program ini merupakan hasil kerja sama sinergis seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

Ahmad Ghufron Al Majid Wardana. (2024). Akuntansi Lingkungan dalam Teori dan Praktek.

Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, *1*(3), 40–44. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.475

Amika, F. Z., & Sulistyowati, T. (2024). Pendekatan Berkeadilan dalam Pembangunan Masyarakat : Studi Literatur Komprehensif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*, 957–972.

Andea, S. G., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2020). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *15*(3), 307–315.

Baridwan, Z. (2000). Perkembangan Teori Dan Penelitian Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *15*(4), 486–497.

Bhakti, Y. B., Simorangkir, M. R. R., Tjalla, A., & Sutisna, A. (2022). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal Of Education*, *8*(2), 783–790.

Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, *6*(2), 309–319. https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229

Erlina, N., Manafe, L. A., & Chamid, A. (2025). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Arsip Kepegawaian : Studi Kasus Penerapan Document Management System (DMS). *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, *4*(2), 69–78.

Fitria, A. M., Sisdianto, E., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). Beyond Profit: Membangun Masa Depan dengan Akuntansi Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Media Akademik*, *2*(12).

Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2 SE-Articles), 146–167. https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58

Herawati, R., Kinasih, H. W., Fitriani, I. R., Oktafiyani, M., Prajanto, A., Krisna, A. M., Purwantoro, & Wini, N. W. S. (2025). *Akuntansi Pajak dan Implikasinya pada Kepatuhan Wajib Pajak*. Cendikia Mulia Mandiri.

Jubaedah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Transparansi Keuangan di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *VIII*(3), 288–299.

Kaswan, K. (2019). *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.

Kurniawan, A. F. (2024). Peran Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Audit Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(1), 936–948. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1822

Latif, F., & Pratama, A. W. (2015). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik (E-Arsip) Berbasis Microsoft Access pada PT. Hi-Test. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, *3*(1), 21–31.

Nugroho, N. (2017). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu. *Jurnal Mercatoria*, *9*(2), 119. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.435

Palis, K. (2025). Transformasi Digital dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi PAD di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *5*(1), 163–190.

Panjaitan, M., Rini, A. D., Agusalim, L., Abdullah, Z., Purwandaya, B., & Pasaribu, B. (2022). Persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trilogi Terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, *7*(2), 351–362. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.394

Potutu, Y., Nuraini, S., Akili, K., Mei, S., Assagaf, Y., Lapangan, P. K., Kejuruan, S. M., Pada, P., & Pemerintah, P. (2022). *Implementasi Praktik Kerja Lapangan sebagai Mata Pelajaran dalam Kurikulum Merdeka*.

Puanandini, D. A., Taufiqurrahmawati, H., Fauzy, A., & Azhari, N. (2024). *Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional*. *3*(2). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1157

Purnamasari, Ayu, E. D., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.

Rahmawati, Fajri, N., & Fatticia, R. (2025). Analisis Strategi Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, *4*, 422–431.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). Sistem informasi akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*, *3*(01).

Rosyidah, U. F., Zuniatin, H., & Rohma, F. F. (2023). Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kinerja. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 36–41. https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i2.642

Sahrin, A., Arafat, Y., & Hadi, A. M. (2022). Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Otonomi. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, *3*(2), 175–184.

Sibagariang, A., Stevani, E., Hutagalung, K., Marpaung, K., & Syahfitri, N. (2025). Pengawasan Keuangan: Kunci Efisiensi dan Pencegahan Penyalahgunaan. *Research of Economics and Business*, *1*(1), 9–18.

Sitanggang, G., Sinurat, D. M., Simanjuntak, F., Tambunan, R., Pakpahan, R. A., & Simanjuntak, S. I. R. (2024). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Gaya Kepemimpinan Organisasi Hmps Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hkbp Nommensen. *Jurnal Ekonomi Sinergi*, *8*(6), 103–117.

Sitepu, A. P. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cv. Azka Pustaka.

Solechan, A. (2021). *Audit Sistem Informasi*.

Wijaya, Y. A., Cahyaningtyas, S. R., & Kartikasari, N. (2025). Analisis Penerapan Income Audit dalam Meningkatkan Akurasi Laporan Keuangan: Studi Kasus Hotel Kini Villa Sumbawa. *RISMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *5*(2), 153–165.

Zikriani, S. W., & Nurabiah. (2025). Analisis Kinerja Pemungutan Pajak dan Restibusi Daerah di Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah. *RISMA: Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*,

5(2).